

**RENCANA KERJA
TAHUN 2026**



**KECAMATAN SUMBANG
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

BAB I 1

PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan..... 5

1.4. Sistematika 5

BAB II..... 9

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 19

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 23

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29

2.6 Inovasi Perangkat Daerah 30

BAB III..... 31

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 31

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 31

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 34

3.3 Program dan Kegiatan..... 35

BAB IV..... 53

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 53

BAB V 93

PENUTUP 93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Rencana pembangunan daerah kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana ditingkat perangkat daerah mulai dari perencanaan jangka menengah lima tahunan yang diwujudkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan perencanaan jangka pendek periode satu tahun yang diwujudkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan beberapa tahap. Tahap pertama persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Kedua, penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Tahap ketiga adalah penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah yang merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah selanjutnya diverifikasi Bappeda untuk menjamin bahwa rancangan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RKPD.

Tahap keempat pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang berkoordinasi dengan Bappeda dan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Selanjutnya adalah tahap perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada Tentang RKPD.

Tahap akhir dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah penetapan. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kemudian diverifikasi dalam rangka penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Perkada paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2026, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 - 2029 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 - 2029

RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RABPD). Program kegiatan dalam KUA PPAS dan RAPBD harus konsisten dengan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sebagai Perangkat Daerah menyusun dokumen Renja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2026 sesuai tugas pokok fungsinya dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
17. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-

- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
25. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2026 adalah:

Menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumbang Tahun 2026 adalah:

1. Sebagai pedoman Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas selama Tahun 2026.

1.4. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

pada bagian ini dijelaskan mengenai Gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang menagtur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun $n-2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan ($n-1$), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas fungsi Perangkat Daerah dan dampaknya terhadap capaian program, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan terhadap perbedaan dengan Rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Bagian ini memuat uraian mengenai berbagai bentuk inovasi yang telah, sedang, atau direncanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bagian ini memuat perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan kegiatan

berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menguraikan secara detail Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah dicapai atau dilaksanakan selama tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV dan perkiraan pencapaian target tahun 2025 Triwulan I dan II.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan Penetapan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Renja Tahun 2026, dan Capaian Analisis Kinerja sampai dengan indikator kinerja kegiatan triwulan II Tahun Anggaran 2025.

Analisis capaian kinerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sampai dengan triwulan II tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Sumbang s/d Tahun 2024
Kabupaten Banyumas

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7				[1] Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	N/A	100%	98,727	98,73%	100%	198.73%	1.987%
7	1			[2] Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	100%	N/A	100%	101,704	101,7%	100%	201.704	2.017%
				[2] Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	86.15	N/A	85,95	82,3	95,75%	85,95	263.2	3.055
7	1	1		[3] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	N/A	100%	109,74	109,74 %	100%	309.74%	3.097%
7	1	1	2.09	[4] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	N/A	100%	119%	119,00 %	100%	319%	3.19%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	1	1	2.06	[4] Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%	N/A	100%	113,33%	113,33 %	100%	313.33%	3.133%
7	1	1	2.08	[4] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%	N/A	100%	100%	100,00 %	100%	200%	2%
7	1	1	2.07	[4] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100%	N/A	100%	110%	110,00 %	100%	0	0,00%
7	1	1	2.01	[4] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dokumen	N/A	5 Dokumen	6 Dokumen	120,00 %	5 Dokumen	16 Dokumen	1.06%
7	1	1	2.02	[4] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	N/A	100%	96,155	96,16%	100%	196.155%	1.961%
7	1	2		[3] PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	N/A	91	98,75	108,52 %	91	270.75	2.911
7	1	2	2.01	[4] Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan	100%	N/A	100%	100%	100,00 %	100%	200%	2%
7	1	2	2.02	[4] Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	1%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									
					Persentase pelaksanaan Pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	1%
7	1	2	2.03	[4] Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	1%
7	1	2	2.04	[4] Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	N/A	100%	100	100,00 %	100%	300%	3%
7	1	4		[3] PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan transtibumlinmas	100%	N/A	100%	100%	100,00 %	100%	300%	3%
					Persentase penanganan pengaduan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	1%
7	1	4	2.01	[4] Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan	100%	N/A	100%	100%	100,00 %	100%	200%	2%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					gangguan yang dilakukan								
7	1	4	2.0 2	[4] Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	1%
7	1	3		[3] PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	N/A	100%	100%	100,00 %	100%	300%	3%
7	1	3	2.0 3	[4] Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	100%	N/A	100%	100%	100,00 %	100%	300%	3%
7	1	3	2.0 1	[4] Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100%	N/A	100%	100%	100,00 %	100%	300%	3%
7	1	5		[3] PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%	N/A	100%	100%	100,00 %	100%	200%	2%
					Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	1%
7	1	5	2.0 1	[4] Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100%	N/A	100%	100%	100,00 %	100%	200%	2%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	1	6		[3] PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes tepat waktu	100%	N/A	100%	100%	100,00 %	100%	300%	3%
					Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	1%
					Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	1%
7	1	6	2.01	[4] Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100%	N/A	100%	75	75,00%	100%	275%	2.75%

Program yang memiliki hasil capaian tertinggi adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 109,74%. Faktor pendukung keberhasilan tercapainya target pada program ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara rutin melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang menunjang program dan indikator.
- 2) Mengidentifikasi kendala dan segera melakukan perbaikan.
- 3) Meningkatkan kualitas layanan penunjang urusan perangkat daerah.

Sementara program yang memiliki hasil capaian terendah adalah program Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sebesar 75%. Faktor penghambat program tersebut tidak mencapai target adalah adanya perubahan anggaran yang tidak mencukupi untuk terselenggaranya kegiatan atau subkegiatan dari program tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:

- 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - 7) Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. Koordinator kegiatan pemberdayaan Masyarakat, meliputi:
- 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati.
- d. Koordinator upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada Bupati.

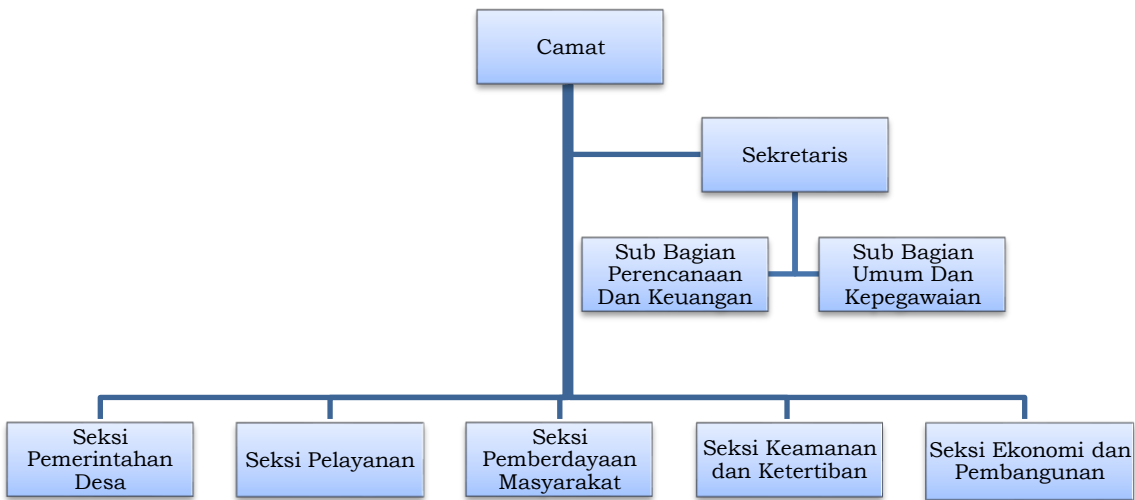
- e. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, meliputi:
 - 1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- f. Koordinasi pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - 1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- g. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Tingkat kecamatan, meliputi:
 - 1) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - 3) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada Bupati.
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - 1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - 4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- j. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;

k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapuan Susunan Organisasaisai Kecamatan adalah sebagai berikut:

- 1. Camat;
- 2. Sekretariat, terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Seksi Pemerintahan Desa ;
- 4. Seksi Pelayanan ;
- 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- 7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umuam ;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar
Struktur Organisasi Kecamatan Sumbang



Pelayanan kecamatan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan Sebagian kewenangan kabupaten yang didelegasikan ke kecamatan, termasuk pelayanan administristif dan fasilitatif kepada Masyarakat. Untuk menjamin kualitas pelayanan publik yan optimal, analisis kinerja pelayanan diukur berdasarkan indikator kinerja pelayanan yang ditetapkan dalam NSPK, SPM dan IKK.

Gambaran pencapaian kinerja pelayanan kecamatan cilongok dapat dilihat pada table T-C 30 berikut:

Tabel T-C.30.
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumbang
 Kabupaten Banyumas

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025		Proyeksi Tahun 2026	Catatan Analisis
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	2	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	-	3,51	3,52	0,590	N/A	3,52	Tambahan indikator Sasaran pada Renja Perubahan tahun 2025
4	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	85.95	83,2	84,10	82,3	N/A	84,10	Perubahan target indikator sasaran berdasarkan reuiu cascading tahun 2025
5	Nilai SPIP	-	3,307	3,347	3,267	N/A	3,347	Tambahan indikator Sasaran pada Renja Perubahan tahun 2025

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 sampai dengan triwulan II, masih terdapat beberapa permasalahan yang dirumuskan berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan Sumbang, antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemenuhan penunjang layanan Kecamatan
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan
3. Belum optimalnya kualitas pengendalian intern pemerintah Kecamatan
4. Belum optimalnya Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
5. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan
6. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka isu strategis Kecamatan Sumbang Pada Tahun 2026 yaitu **“Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan”**.

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Kecamatan Sumbang, sehingga perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang

berkualitas dan tentu saja anggaran yang memadai guna mendukung tercapainya IKU OPD.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumbang. Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. Strenght (Kekuatan)

1. SDM Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 24 orang terdiri dari 14 ASN dan 9 Non ASN, yang didominasi oleh pendidikan S1 dan SLTA. Dilihat dari pendidikan regular, pegawai Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan.
2. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sudah cukup memadai, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.
3. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan.

B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sumbang juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Sumber daya manusia yang ada, belum semua menguasai IT,
2. Masih kurangnya disiplin sumber daya manusia.

C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung pencapaian pelayanan dan urusan pemerintahan di Kecamatan. Peluang-peluang tersebut adalah:

1. Tersedianya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan,
2. Adanya kemauan dan keinginan dari sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan kemampuannya,
3. Adanya kerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan data yang dibutuhkan.
4. Adanya keinginan untuk menyusun perencanaan yang baik dari berbagai pihak.
5. Adanya dukungan dari masyarakat dan legislatif

D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah. Ancaman yang mungkin terjadi antara lain:

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.
2. Adanya bencana alam yang sering terjadi (tanah longsor, banjir, angin puting beliung).
3. Kurangnya etos kerja
4. Tingginya angka kemiskinan.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran

pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup;
2. Adanya mekanisme teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- Kurangnya keterlibatan stakeholders pada proses penyusunan perencanaan pembangunan.
- Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi
- Pelaksananaan perencanaan tidak tepat waktu karena mekanisme tahapan panjang dan melibatkan banyak pihak dengan peraturan perundangan yang dinamis.
- Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
- Tuntutan pelaksanaan Musrenbang yang partisipatif masih belum terwujud secara maksimal karena belum sinergisnya kepentingan yang diakomodir.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tahun 2025 – 2029, maka strategi dan kebijakan yang telah ditempuh Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan ASN yang melek teknologi informasi khususnya terkait aplikasi yang berhubungan dengan E-Office,
2. Meningkatkan kesesuaian capaian kinerja OPD terhadap RPJMD,
3. Meningkatkan fasilitasi penerapan inovasi,
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
5. Meningkatkan pelayanan perkantoran,
6. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a) Rancangan kerangka ekonomi daerah
- b) Program prioritas pembangunan daerah dan
- c) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Sumbang berdasarkan RKPD Kabupaten Banyumas sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Rencana Kerja OPD se Kabupaten Banyumas yang melaksanakan program dan kegiatan yang berlokasi di wilayah Kecamatan Sumbang. Untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Kecamatan Sumbang dan Pemerintah Kabupaten Banyumas karena adanya review terhadap Renstra, maka diperlukan penyesuaian indikator tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja tahun 2026 Kecamatan Sumbang.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kabupaten Banyumas

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,100		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,100	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Nilai SPIP Perangkat Daerah	3,347		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Nilai SPIP Perangkat Daerah	3,347	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3,520		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3,520	
	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,100		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,100	
	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Nilai SPIP Perangkat Daerah	3,347		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Nilai SPIP Perangkat Daerah	3,347	
	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3,520		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3,520	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100 %	2.847.207.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100 %	2.847.207.001

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	100 %	5.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dokumen	5.500.000
		Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	100%			Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 %	2.069.916.286	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 %	2.069.916.286
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100 %	115.730.327	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100 %	115.730.327
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase Pengadaan Barang	100 %	84.355.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase Pengadaan Barang	100 %	84.355.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100 %	478.080.388	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100 %	478.080.388
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Banyumas, Subang,	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	93.625.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Banyumas, Subang,	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	93.625.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		semua kel/Desa					semua kel/Desa			
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	39.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	39.000.000
		Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	100 %			Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	100 %	
9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan	100 %	12.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan	100 %	12.000.000
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	9.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	100 %	9.000.000
11	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100 %	8.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100 %	8.000.000
12	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100 %	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100 %	10.000.000
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kab Banyumas, Subang,	Persentase pemberdayaan	100 %	53.499.999	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kab Banyumas, Subang,	Persentase pemberdayaan	100 %	53.499.999

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	semua kel/Desa	masyarakat desa dan kelurahan,			MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	semua kel/Desa	masyarakat desa dan kelurahan		
		Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah	100 %			Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah	100 %	
14	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	100 %	34.499.999	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100 %	34.499.999
15	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	100 %	19.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	100 %	19.000.000
16	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100 %	28.600.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100 %	28.600.000
		Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100 %			Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	
17	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	12 Kegiatan	24.600.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	12 Kegiatan	24.600.000
18	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100 %	4.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100 %	4.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	52.400.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	52.400.000
20	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	4	52.400.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	4	52.400.000
21	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase Fasilitas Penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 %	28.500.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase Fasilitas Penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 %	28.500.000
22	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100 %	28.500.000	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab Banyumas, Subang, semua kel/Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100 %	28.500.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Sumbang akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, para pelaku pariwisata, kalangan seniman, perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Sumbang maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat biasanya berkaitan dengan kegiatan teknis SKPD di luar Kecamatan, namun perencanaan KUA dan PPAS tetap dilaksanakan oleh Bappeda sebagai SKPD Perencana di Kabupaten Banyumas semua kegiatan SKPD baik dari musrenbang/ masyarakat maupun usulan dari Dinas/ Lemtekda/ Badan/ Kecamatan dan Kelurahan.

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dapat dilihat pada tabel C-T 32:

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Banyumas

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sumbang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1	Pengadaan dan pemeliharaan sarpras untuk pelayanan publik di Kecamatan Sumbang	Kecamatan Sumbang	Persentase Pengadaan dan pemeliharaan sarpras	200.000.000	Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, Kab. Banyumas
2	Peningkatan kapasitas pelayanan publik dan pembinaan masyarakat desa/kelurahan di Kecamatan Sumbang	Kecamatan Sumbang	Jumlah Peserta yang mengikuti peningkatan Kapasitas	200.000.000	Peningkatan Kapasitas Kadus, FKDM, dan Satlinmas, dalam Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kecamatan Sumbang, Kab. Banyumas
3	Pengadaan dan pemeliharaan sarpras untuk pelayanan publik di Kecamatan Sumbang	Kecamatan Sumbang	Persentase Pengadaan dan pemeliharaan sarpras	200.000.000	Pembangunan Gedung Kesekretariatan Bersama (FKDM, Karang Taruna, Tim Kencana, Pusdalop), Kab. Banyumas
4	Pengadaan dan pemeliharaan sarpras untuk pelayanan publik di Kecamatan Sumbang	Kecamatan Sumbang	Persentase Pengadaan dan pemeliharaan sarpras	200.000.000	Pengadaan Perlengkapan Kantor Kecamatan Sumbang, Kab. Banyumas
5	Pengadaan dan pemeliharaan sarpras untuk pelayanan publik di Kecamatan Sumbang	Kecamatan Sumbang	Pesentase Pengadaan dan pemeliharaan sarpras	200.000.000	Pemeliharaan Sarpras Kecamatan Sumbang, Kab. Banyumas
				1.000.000.000	

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Beberapa Inovasi sedang dikembangkan di Kecamatan Sumbang, antara lain Inovasi SUPEL CETAR dan Inovasi SUMBANG SATU DATA Uraian inovasi perlu mencakup:

1. Inovasi SUPEL CETAR

a. Nama inovasi	: SUPEL CETAR (Sistem Unggul Pelayanan Cepat, Tanggap, dan Ramah)
b. Tujuan dan latar belakang inovasi	: Meningkatkan akses dan kecepatan pelayanan publik, Transparansi dan akuntabilitas
c. Bentuk dan ruang lingkup inovasi	: Peningkatan kualitas pelayanan administrasi publik, Penerapan prinsip 3T, Pelayanan berbasis digital/manual terintegrasi, Etika layanan prima
d. Tahun mulai pelaksanaan dan status pelaksanaan	: Juli 2025 dan Masih berlangsung dan aktif dilaksanakan.
e. Hasil/impact yang telah dicapai	: Peningkatan Kepuasan Masyarakat, Efisiensi Waktu Layanan, Budaya Kerja Petugas Lebih Profesional, Aksesibilitas Layanan Meningkat, Kolaborasi dan Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas
f. Rencana pengembangan inovasi	: Penguatan Digitalisasi Pelayanan, Standardisasi dan Perbaikan SOP Pelayanan, Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi SDM, Perluasan Kolaborasi Lintas Sektor, Monitoring, Evaluasi dan Publikasi Berkala, Branding dan Replikasi

2. Inovasi SUMBANG SATU DATA

a. Nama inovasi	: SUMBANG SATU DATA
b. Tujuan dan latar belakang inovasi	: Adanya kebutuhan data lintas Subbag dan Seksi dalam Kecamatan Sumbang.
c. Bentuk dan ruang lingkup inovasi	: Inovasi Berbentuk Aplikasi dengan Memhubungkan beberapa <i>Drive</i> Online sehingga bisa diakses Lintas Subbag dan seksi
d. Tahun mulai pelaksanaan dan status pelaksanaan	: 2025 dan masih dalam Proses Pengembangan
e. Hasil/impact yang telah dicapai	: Belum ada Hasil/ dalam tahap Uji Coba
f. Rencana pengembangan inovasi	: Akan terus dikembangkan di Tahun 2026

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan daerah tahun 2026 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2026 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Selain itu prioritas pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

RKP Tahun 2026 merupakan penjabaran dari dokumen RPJMN 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 didasarkan atas Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Tahun 2025-2029, yaitu *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Misi pembangunan/ Asta Cita, yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional. Prioritas Nasional tersebut antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 disusun pentahapan fokus kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan pada tahun 2026 fokus diarahkan pada kebijakan “Meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional”. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kebijakan tersebut antara lain:

1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. penguatan sistem agroforestry berbasis potensi lokal;
5. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (large scale food fortification/LSFF);
8. pencegahan pemborosan pangan (food loss and waste).

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 juga diarahkan untuk “Penguatan Landasan Pembangunan Daerah” dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah yaitu:

1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis.
2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan.
3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Rencana pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2026 disusun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD. Adapun visi yang ditetapkan adalah: “*Mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera.*” Perwujudan visi tersebut dijabarkan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan menyejahterakan;
3. Memperkuat ketahanan pangan;
4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah berintegritas, adaptif, dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah;
6. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 diarahkan untuk *“Penyiapan penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk peningkatan kualitas SDM dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang adaptif”*. Secara keseluruhan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2026 diprioritaskan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu secara inklusif
- b. Meningkatkan budaya literasi, pengelolaan olahraga dan kebudayaan Banyumas untuk penguatan Karakter Sumber Daya Manusia yang unggul
- c. Meningkatkan pembangunan keluarga yang memperhatikan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, kesetaraan gender, pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat secara inklusif, serta peningkatan peran aktif pemuda
- d. Meningkatkan pengembangan SDM dan kelembagaan pelaku ekonomi
- e. Penguatan Implementasi regulasi yang hijau dan adaptif
- f. Meningkatkan pengembangan produk potensial dan produk unggulan serta penguatan sarana dan prasarana pendukung
- g. Meningkatkan penanganan kemiskinan dan pelayanan perlindungan sosial secara terintegrasi
- h. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan penurunan pengangguran
- i. Memperkuat Ketahanan Pangan Lokal dengan peningkatan produksi dan produktivitas pangan serta pengembangan pangan lokal
- j. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan konektivitas serta instrumen pendukung yang memadai dan berkelanjutan

- k. Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi mendukung Reformasi Birokrasi
- l. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah secara berkelanjutan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran dilakukan untuk merespons isu-isu strategis yang telah diidentifikasi. Kecamatan Sumbang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bertanggung jawab membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewilayahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan

Rencana pembangunan disusun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD. Adapun visi yang ditetapkan adalah: *“Mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera.”* Perwujudan visi tersebut dijabarkan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan menyejahterakan;
3. Memperkuat ketahanan pangan;
4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah berintegritas, adaptif, dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah;
6. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 diarahkan untuk *“Penyiapan penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk peningkatan kualitas SDM dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang adaptif”*.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Kecamatan Sumbang Kab. Banyumas Tahun 2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis

Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kecamatan Sumbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan. Penyusunan perencanaan sesuai dengan tugas pokok fungsi Kecamatan Sumbang dalam rangka mendukung Bupati Banyumas dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan.

Tabel Rencana Program Dan Kegiatan Kecamatan Sumbang Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel T-C.33 sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Banyumas

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANNA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11		15	16
		KECAMATAN SUMBANG				3.049.207.000,00				2.869.708.000,00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.049.207.000,00				2.869.708.000,00
	7.01	KECAMATAN				3.049.207.000,00				2.869.708.000,00
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100 %		2.847.207.001,00			-	2.671.708.001,00
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Dokumen	5.500.000,00			-	5.500.000,00
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.500.000,00
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	2 Laporan	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3.000.000,00
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan</i>		100 %	2.069.916.286,00			-	1.697.638.601,00
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	12 Orang/bulan	2.041.536.286,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.665.138.601,00
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Sumbang	12 Dokumen	20.880.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			25.000.000,00
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7.500.000,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum</i>		100 %	115.730.327,00			-	269.788.120,00
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	1 Paket	6.001.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6.000.000,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	4 Paket	33.738.027,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55.000.000,00
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Banyumas, Sumbang, Sumbang	2 Paket	6.464.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15.000.000,00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Banyumas, Sumbang, Sumbang	6 Paket	41.449.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			85.000.000,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	2 Paket	10.042.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15.000.000,00

	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	11.860.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			83.788.120,00
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	6.175.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000,00
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang</i>		100 %	93.625.000,00			-	65.000.000,00
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	1 Unit	33.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15.000.000,00

	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	5 Unit	44.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000,00
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Sumbang	2 Unit	16.625.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20.000.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan</i>		100 %	478.080.388,00			-	458.781.280,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	109.090.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			90.000.000,00

	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	353.989.588,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			358.781.280,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>		100 %	84.355.000,00			-	175.000.000,00
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	9 Unit	52.025.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75.000.000,00

	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Sumbang	1 Unit	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15.000.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Sumbang	25 Unit	13.930.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60.000.000,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Sumbang	1 Unit	10.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000,00
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Sumbang	1 Unit	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15.000.000,00
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan Sesuai dengan Standar Pelayanan(SP)	Kab. Banyumas, Sumbang, Sumbang	100%	39.000.000,00			-	35.000.000,00
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan</i>		100 %	12.000.000,00			-	8.000.000,00
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	4 Laporan	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4.000.000,00
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4.000.000,00

	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan</i>		100 %	9.000.000,00			-	9.000.000,00
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	9 Laporan	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9.000.000,00
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	<i>Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum</i>		100 %	8.000.000,00			-	8.000.000,00
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum								
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8.000.000,00
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>		100 %	10.000.000,00			-	10.000.000,00

	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan								
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	9 Laporan	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.000.000,00
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.000.000,00
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	100 %	53.499.999,00			-	53.499.999,00
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat desa</i>		100 %	34.499.999,00			-	34.499.999,00
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								

			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7.000.000,00
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7.000.000,00
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	4 Laporan	20.499.999,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20.499.999,00
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-		-	19.000.000,00			-	19.000.000,00
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan								

			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9.000.000,00
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000,00
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	100%	28.600.000,00			-	49.000.000,00
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan</i>		4 Laporan	24.600.000,00			-	45.000.000,00
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	14.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35.000.000,00

	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000,00
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</i>		100 %	4.000.000,00			-	4.000.000,00
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4.000.000,00
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Efektifitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	100%	52.400.000,00			-	32.000.000,00
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan</i>		2 Laporan	52.400.000,00			-	32.000.000,00

	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	60 Orang	16.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16.000.000,00
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	36.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16.000.000,00
6,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Penyusunan APBDes sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tepat waktu	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	100%	28.500.000,00			-	28.500.000,00
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase desa yang mendapatkan pendampingan</i>		100 %	28.500.000,00			-	28.500.000,00
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								

			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7.000.000,00
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	9.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9.500.000,00
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa								
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.000.000,00
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7.000.000,00

	J U M L A H	3.049.207.000,00		2.869.708.000,00
--	-------------	------------------	--	------------------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2026 ditunjukkan pada lampiran matrik renja sebagai berikut:

Uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada rencana kerja Kecamatan Sumbang Tahun 2026

dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel T.C. 34

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASARAN	PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
											NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		KECAMATAN SUMBANG						3.049.207.000,00						
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.049.207.000,00						
	7.01	KECAMATAN						3.049.207.000,00						
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				83.200							
			Nilai SPIP Perangkat Daerah				3.307							
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah				3.510							
		Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				83.200							
			Nilai SPIP Perangkat Daerah				3.307							
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah				3.510							
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah				100%	2.847.207.001,00						

	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			5 Dokumen	5.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG

												Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi		
	7.01.01.2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan</i>	-			100 %	2.069.916.286,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas	Kecamatan	KECAMATAN SUMBANG

											narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penyelengg araan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi		
	7.01.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bula n	2.041.536.286,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Meningkatk an Kualitas dan Efektivitas Penyelengg araan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	K ecamatan	KECAMATAN SUMBANG

	7.01.01.2.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	20.880.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Sumbang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.01.2.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas	Kecamatan	KECAMATAN SUMBANG

												Penyeleng araan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum</i>	-			100 %	115.730.327,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	6.001.300,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Meningkatk an Kualitas dan Efektivitas Penyelengg araan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Paket	33.738.027,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Meningkatk an Kualitas dan Efektivitas Penyelengg araan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG

												Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi		
	7.01.01.2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	6.464.500,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Sumbang	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.01.2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	41.449.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Sumbang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10.042.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG

												Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi		
	7.01.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	11.860.500,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Meningkatk an Kualitas dan Efektivitas Penyelengg araan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.01.2.06.001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												

			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				7 Dokumen	6.175.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang</i>	-			100 %	93.625.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG

	7.01.01.2.07.000 5	Pengadaan Mebel												
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	33.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.01.2.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	44.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG

											narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penyelengg araan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi		
	7.01.01.2.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	16.625.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Sumbang	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Meningkatk an Kualitas dan Efektivitas Penyelengg araan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan</i>	-			100 %	478.080.388,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	109.090.800,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG

												Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi		
	7.01.01.2.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	353.989.588,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	-			100 %	84.355.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG

	7.01.01.2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				9 Unit	52.025.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.01.2.09.000 5	Pemeliharaan Mebel												
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				1 Unit	4.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Sumbang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG

											narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penyelengg araan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi		
	7.01.01.2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				25 Unit	13.930.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Sumbang	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Meningkatk an Kualitas dan Efektivitas Penyelengg araan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG

	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.400.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Sumbang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Sumbang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG

											narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penyelengg araan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi		
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan Sesuai dengan Standar Pelayanan(SP)				100 %	39.000.000,00						
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan</i>	-			100 %	12.000.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelengg araan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG

	7.01.02.2.01.000 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	0.000,00	8.00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.02.2.01.000 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	0.000,00	4.00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG

											narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penyelengg araan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan</i>	-			100 %	9.00 0.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Meningkatk an Kualitas dan Efektivitas Penyelengg araan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.02.2.02.000 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												

			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				9 Laporan	0.000,00	9.00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	<i>Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum</i>	-			100 %	0.000,00	8.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG

	7.01.02.2.03.000 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum												
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>				1 Dokumen	8.00 0.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>	-			100 %	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG

												Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi		
	7.01.02.2.04.000 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan												
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>				9 Laporan	5.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.02.2.04.000 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan												

			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 %	53.499.999,00						
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat desa</i>	-			100 %	34.499.999,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG

												Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi			
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	0.000,00	7.00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan													

			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				4 Dokumen	0.000,00	7.00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	20.499.999,00		Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG

												Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi		
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	19.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan												
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG

											narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penyelengg araan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi		
	7.01.03.2.03.000 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat												
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Meningkatk an Kualitas dan Efektivitas Penyelengg araan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG

4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum				100 %	28.600.000,00						
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan</i>	-			4 Laporan	24.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	14.600.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG

											narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penyelengg araan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi		
	7.01.04.2.01.000 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Meningkatk an Kualitas dan Efektivitas Penyelengg araan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG

	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</i>	-			100 %	4.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia												
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>				12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG

												Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi		
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Efektifitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	52.400.000,00						
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	-			2 Laporan	52.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												

			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				60 Orang	16.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	36.400.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG

												Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi		
6,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Penyusunan APBDes sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tepat waktu				100 %	28.500.000,00						
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase desa yang mendapatkan pendampingan</i>	-			100 %	28.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa												
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	0.000,009.50	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG

												Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi			
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2 Dokumen	0.000,00	5.00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													

			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	Kecamatan dan Masyarakat	KECAMATAN SUMBANG
	J U M L A H							3.049.207.000,00						

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Sumbang Tahun 2026. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Kecamatan Sumbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2026, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Kecamatan Sumbang Tahun 2026 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026.
2. Rencana Kerja Kecamatan Sumbang Tahun 2026 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026.
3. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Kabupaten Banyumas Tahun 2026 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas.

CAMAT SUMBANG
HERMAWAN NOVIANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19741129 200212 1 001